

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan Diajukan oleh:

NANDA AMDI

E051 171 011



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan Diajukan oleh:

NANDA AMDI

E 051 171 011

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal Senin, 07 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

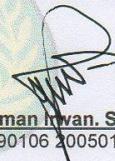
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. A. M. Rusli, M. Si
NIP. 19640727 1991 01 1 001



Dr. A. Lukman Iwan, S.IP, M.Si
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991 01 1 001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

NANDA AMDI

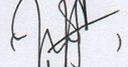
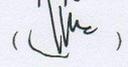
E 051 171 011

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 21 Juni 2021

Menyetujui

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Sekretaris	: Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Nanda Amdi
NIM : E051171011
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

**Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata di
Kabupaten Bulukumba**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Juni 2021

Yang menyatakan



Nanda Amdi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu, Puji syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta langit bumi dan segala isinya. atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Selama proses pengerjaan skripsi ini banyak tantangan dan rintangan yang penulis hadapi. Meskipun demikian Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi orang lain.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ambo Eru dan Ibunda Mardiana yang tanpa lelah telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang tak terhingga kepada Penulis. Terima kasih untuk segala dukungan dan pengorbanan tanpa pamrih yang di berikan kepada penulis. Terima kasih untuk saudara(i) penulis Haerul Amdi, Dedi Amdi, Eva Nurfadillah Amdi dan Farhan Ramadhan yang telah mensupport serta mendoakan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, Terima kasih yang sebesar-

besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan administrasi.
3. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing 1 yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. A. M. Lukman Irwan, S. IP M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membagi ilmu dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang

telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya DPRD Kabupaten Bulukumba, Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Desa Ara Kecamatan Bontobahari dan seluruh elemen dari Yayasan perintis wisata Apparalang.

9. Terima kasih untuk adik Andi Meuthia Adilla Syarif dan Novita Nurfitriani yang telah mensupport dengan ikut membantu dan menemani penulis dalam melaksanakan penelitian. Tetap menjadi pribadi yang lebih baik terhadap sesama.
10. Terima kasih untuk tiga kakak yang sangat ramah dan baik hati : Kak Nisa, Kak Imran dan Kak Ayulia yang telah menyempatkan waktunya memberikan semangat dan berbagai informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat seperjuangan enam wanita ceria Save The Date: Widya, Uny, Arny, Dila, Hasliana dan Yuyu. Sahabat seperjuangan peneliti dalam melewati segala suka-duka perkuliahan dan perjalanan keseharian di kost yang senantiasa menyemangati peneliti sampai penyelesaian skripsi ini selesai. Telah banyak cerita kehidupan kampus yang diukir. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan.
12. Terima kasih untuk saudara(i) seperjuangan penulis di kampus merah “KAIZEN Ilmu Pemerintahan 2017 “ yakni Ari Yolanda, Alfa,

Ade, Fadel, Alam, Ongkel, Farhan, Onco, Ibnu, Wawan, Fiqqi, Fikri, Dandis, Bahrul, Razak, Qadry, Maulida, Nisa, Yuyu, Widya, Aurel, Uny, Arny, Ulfi, Ilmy, Enil, Anna, Windy, Widy, Sabrina, Astry, Syarifa, Hasliana. Terima kasih atas segala pelajaran hidup saat menyemai kehidupan kampus, Semoga semuanya dapat menggapai cita dan cinta yang dituju.

13. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas yang telah menjadi keluarga baru bagi Penulis dan memberikan banyak pelajaran hidup dalam mengembangkan diri untuk berproses bersama teman-teman lainnya. Salam Merdeka Militan!
14. Terima kasih kepada Sospol Dance Club (SODEC UNHAS) yang telah mengembangkan potensi dan membantu peneliti selama dua tahun terakhir baik dari segi pengembangan kesenian, pertemanan maupun *softskill* hal tersebut sangat membantu peneliti menjadi pribadi yang lebih bisa mengembangkan kemampuan diri kedepannya.
15. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bulukumba 04 Gelombang 104. Semoga tetap diberi kesehatan dan dapat meraih cita-cita masing-masing.

Makassar, 4 Juni 2021

Nanda Amdi

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 TINJAUAN TENTANG PERAN	9
2.2 TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	11
2.3 TINJAUAN TENTANG DINAS PARIWISATA	15
2.4 PENGELOLAAN PARIWISATA	19
2.5 TINJAUAN TENTANG PENGEMABANGAN PARIWISATA (Wisata Bahari).....	21
2.6 PENGEMBANGAN PARIWISATA	31
2.7 KERANGKA KONSEP	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 TIPE PENELITIAN	35
3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	35
3.3 INFORMAN PENELITIAN.....	35
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	36
1. JENIS DATA	37
2. FOKUS PENELITIAN.....	37
3.5 ANALISIS DATA	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba	41
4.1.1. Sejarah terbentuknya Kabupaten Bulukumba	41
4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba.....	45
4.1.3. Keadaan Topografis Kabupaten Bulukumba.....	48
4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba	50
4.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.....	51
4.2.1. Sejarah terbentuknya Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	51
4.2.2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten	52
4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.....	58
4.2.4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	60
4.3. Gambaran Umum Kecamatan Penelitian.....	66
4.4. Hasil Penelitian Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba	71
4.4.1 Pengorganisasian Destinasi Objek Wisata.....	71
4.4.2 Pengendalian Destinasi Objek Wisata	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 KESIMPULAN.....	96
5.2 SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengunjung Wisatawan Pantai Tebing Apparalang Tahun 2017-2019	4
Tabel 2. Jumlah Anggaran Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2019	5
Tabel 3. Kependudukan	47
Tabel 4. Luas Wilayah, Status, Dan Klasifikasi Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bonto Bahari 2018	67
Tabel 5. Letak Geografis Dan Ketinggian Menurut Desa/Kelurahan Di ...	68
Tabel 6. Banyaknya Penduduk, Luas Desa Dan Kepadatan Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bonto Bahari 2018.....	68
Tabel 7. Anggaran Penyediaan Infastruktur Oleh Yayasan Perintis Apparalang	74
Tabel 8. Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Apparalang	75
Tabel 9. Pengelola objek wisata Apparalang.....	85
Tabel 10. Jumlah Biaya Masuk Objek Wisata Apparalang	86

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. KERANGKA KONSEP	34
GAMBAR 2. PETA PERSEBARAN WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA	48

ABSTRAK

Nanda Amdi, Nomor Induk Mahasiswa E051171011, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba”, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M. Si sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Dr. A. M. Lukman Irwan, S. IP M.Si., sebagai Pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba sesuai dengan peraturan Bupati No 87 Tahun 2016 yang berlaku yakni dalam hal pengorganisasian dan pengendalian destinasi objek wisata.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Bulukumba.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan pariwisata terhadap upaya pengorganisasian dan pengendalian destinasi wisata.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Pariwisata.

ABSTRACT

Nanda Amdi, student number E051171011, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis titled Implementation of "The Role of Local Government in Tourism Management in Bulukumba Regency", under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M. Si as Supervisor 1 and Mr. Dr. A. M. Lukman Irwan, S. IP M.Si., as Supervisor 2.

This research aims to determine the role of the Local Government in the management of tourism in Bulukumba Regency in accordance with the regulation of the Regent No. 87 of 2016 in force, namely in terms of organizing and controlling tourist attraction destinations.

The type of research used is a descriptive qualitative research type, i.e. this research is intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, by describing data and facts related to the problem and the unit studied. This research aims to provide a clear picture of the role of the Local Government in the management of tourism in Bulukumba district.

The results of this study show that: The role of the Local Government in this case the Bulukumba District Tourism Office in the management of tourism to the efforts of organizing and controlling tourist destinations.

Keywords: Role, Local Government, Management, Tourism.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km dengan jumlah penduduk Indonesia yang hidup dikawasan pesisir sejumlah 16,42 juta jiwa (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2013). Dengan banyaknya pulau di Indonesia, berarti banyak pula daerah di Indonesia yang terletak dibagian pesisir atau pantai. Hal demikian dapat memberikan dampak baik terhadap daerah pesisir seperti hadirnya beberapa potensi pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sekunder manusia dalam hal liburan. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 1 ayat (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan (Pasal 18 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata). Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa

daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pengembangan Pariwisata di Daerah masing-masing yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kebijakan tersebut, maka daerah berkesempatan dan berpeluang untuk menunjukkan potensi wisata yang dimiliki dan mengembangkan Pariwisata demi peningkatan pendapatan negara secara umum dan daerah secara khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata ".Yang berarti bahwa pengembangan pariwisata setiap daerah harus memperhatikan potensi daerah masing-masing.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Pesisir bagian Timur. Dari sekian persen luas wilayah yang ada, kabupaten Bulukumba memiliki daerah pesisir dengan luas 1.154,7 km² atau sekitar 2,5 persen. Bagian timur kabupaten Bulukumba yang bertopografi pesisir menjadikan Bulukumba mempunyai garis pantai sepanjang 128 km dengan luas wilayah pengelolaan perairan kabupaten Bulukumba seluas 948.224 km². Oleh karenanya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bulukumba tahun 2016-2021 menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan atau pengendalian pembangunan yang merupakan indikator pengelolaan kepariwisataan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba terkait pengelolaan pariwisata menjadi fungsi dinas pariwisata adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian pariwisata di kabupaten Bulukumba.

Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba memiliki potensi pariwisata yang beragam, salah satunya adalah kawasan pantai Apparalang. Kawasan pantai ini bejarak sekitar 200 km dari Kota Makassar. Akses untuk menuju pantai ini cukup mudah, dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan menempuh perjalanan darat kurang lebih selama 20 menit dari arah pantai Tanjung Bira dan sekitar 60 menit dari pusat ibukota Kabupaten Bulukumba.

Selain memiliki daya tarik seperti tebing karangnya yang eksotis dan air lautnya yang biru kehijauan, ternyata pantai ini juga masih menawarkan pemandangan sunrise pada pagi hari. Akan tetapi pantai tebing ini masih jarang dikunjungi mungkin karena minimnya informasi yang ada mengenai keberadaan pantai ini. Kawasan ini memang belum seterkenal Pantai Tanjung Bira karena tergolong kawasan wisata yang

masih baru, dan dirintis oleh warga setempat pada tahun 2011 lalu.

Dalam ketersediaan lahan di lokasi pantai ini masih kurang karena pengunjung masih menggunakan tanah masyarakat untuk dijadikan sebagai lahan parkir serta aksesibilitas pantai menuju lokasi ini masih dengan kondisi jalan buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana disekitar pantai seperti tempat rumah makan yang masih kurang. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, ditemukan data adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pengunjung wisatawan Pantai Tebing Apparalang tahun 2017-2019

TAHUN	JUMLAH PENGUNJUNG
2017	14,407
2018	15,560
2019	16,182

Sumber data: catatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan data di atas, dari kurun waktu 2017 hingga 2019 jumlah pengunjung/wisatawan selalu mengalami kenaikan. Jumlah kenaikan wisawatan tersebut sangat berpengaruh dalam penganggaran pembangunan pariwisata. Adapun penjabaran jumlah anggaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah anggaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Bulukumba tahun 2017-2019

TAHUN	JUMLAH ANGGARAN
2017	3,534,096,000
2018	4,681,918,514
2019	4,196,376,366

Sumber data: catatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

Dari tabel penganggaran di atas dapat dilihat bahwa anggaran dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Bulukumba mengalami kenaikan di tahun 2017- 2018 lalu pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2019 jumlah data pengunjung wisatawan Pantai Tebing Apparalang adalah sebanyak 16,182 orang sementara untuk jumlah anggaran adalah sebanyak Rp 4,196,376,366 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini kemudian mengakibatkan kurangnya perkembangan pengelolaan pembangunan objek wisata.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten Bulukumba. Hadirnya dinas pariwisata merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata di daerah. Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja yang

merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bulukumba berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Fungsi Dinas Pariwisata ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, penyelenggara Pariwisata, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian peneliti adalah objek wisata bahari dalam hal ini Wisata Pantai Tebing Apparalang, objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, memiliki panorama pantai yang sangat indah dengan tebing-tebing yang curam dan batuan karang. Akan tetapi, sarana untuk menempuh destinasi wisata tersebut tidak memadai disebabkan kondisi jalan curam, serta tidak adanya tempat peristirahatan dan rumah makan yang disediakan bagi pengunjung.

Berbagai masalah sektor pengelolaan kepariwisataan di kabupaten Bulukumba dalam hal ini adalah pengelolaan tempat wisata yang tidak maksimal, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya promosi pariwisata yang belum memiliki fasilitas yang memadai, pengembangan Sumber Daya Manusia yang bekerja pada objek wisata terkait dengan promosi pariwisata serta pengolahan administrasi pengunjung wisatawan yang belum maksimal dan penyediaan anggaran yang masih kurang untuk pengembangan pariwisata ke dinas pariwisata.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai peran pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Penulis kemudian mengangkat judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN BULUKUMBA”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini maka peneliti mengemukakan Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan pengorganisasian dan pengendalian destinasi wisata di kabupaten Bulukumba?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan pengorganisasian dan pengendalian destinasi wisata di kabupaten Bulukumba.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis hasil penelitian di harapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat (dinas pariwisata) dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan pada

umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

2. Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu Lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengkaji pengelolaan tentang objek wisata Bulukumba.
3. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 TINJAUAN TENTANG PERAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang

aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015:215).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto).

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto

dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

2.2 TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu

rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong dalam Salam).

Dari definisi di atas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan aparatur negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak

terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Ryas Rasyid (2000 : 59) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu;

1. Fungsi Pelayanan (*public service*)
2. Fungsi Pembangunan (*development*)
3. Fungsi Pemberdayaan (*empowering*)
4. Fungsi Pengaturan (*regulation*)

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri

dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Setelah UU No.23 tahun 2004 terbitlah UU tentang pemerintah daerah yang paling baru yaitu UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam ketentuan yang diatur dalam ayat 3 pasal 26 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengalkan pencasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempetahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuang

daerah.

10. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD.

2.3 TINJAUAN TENTANG DINAS PARIWISATA

Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas dibidang kepariwisataan daerah di Kabupaten Bulukumba berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah "Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah".

Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Tugas dan fungsi utama dinas daerah yang memberi pelayanan

kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu, 1997).

Dinas Pariwisata sebagai salah satu dinas di Kabupaten Bulukumba adalah organisasi pariwisata daerah yang bertugas dalam menjalankan roda pembangunan di sektor pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 87 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata :

- 1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pariwisata mempunyai fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pariwisata ;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pariwisata;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAYA TARIK
WISATA**

(1) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan sinergitas pengembangan daya tarik wisata secara terpadu dengan kabupaten dengan Kotamadya, *stakeholder* pariwisata lainnya dan instansi terkait
- g. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta identifikasi objek dan daya tarik wisata;
- h. melakukan pengelolaan dan penataan objek wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan ;
- i. melakukan pembinaan manajemen tata kelola dan desa wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan kepariwisataan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4 PENGELOLAAN PARIWISATA

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan adalah suatu usaha atau tindakan atau kegiatan penyempurnaan yang dilakukan melalui proses disertai dengan usaha pertumbuhan tersebut sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh yang lebih baik.

Pujiono (1992:23) mendefinisikan pengelolaan/kegiatan adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju ke arah tujuan yang hendak dicapai dan tetap dalam ke arah kebijaksanaan yang ditetapkan.

Menurut Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah sebuah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat didalamnya yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

3. Adanya sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Bulukumba Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 87 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata. Indikator pengelolaan pada Pasal 18 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di atas yaitu menitikberatkan pengelolaan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian yang dimaksud adalah menentukan, mengelompokkan dan mengatur berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Indikator dari tahap pengorganisasian adalah koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata.
2. Tahapan pengendalian (Monitoring) merupakan tahapan yang sangat penting dilaksanakan untuk dapat menjamin agar apa yang telah direncanakan semula akan

dilaksanakan secara baik dilapangan sesuai dengan yang diharapkan. Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan. Adapun indicator dalam tahap pengendalian adalah melakukan pemantauan dan/atau pengawasan penyelenggaraan di bidang pariwisata;

2.5 TINJAUAN TENTANG PENGEMABANGAN PARIWISATA (Wisata Bahari)

1. KEPARIWISATAAN

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1, Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Dalam kepariwisataan, menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:

1. Wisatawan

Adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.

2. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan berlangsung pada tugas area geografi, seperti berikut ini :

- a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan berada ketika ia melakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
- b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hongkong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.
- c) Daerah Tujuan Wisata (DWT), daerah ini sering dikatakan sebagai *sharp end* (ujung tombak) pariwisata. Di DWT ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga

merupakan *raison d'être* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan.

3. Industri Pariwisata

Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata. Industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan. Penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.
- b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan kepariwisataan meliputi:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 3) Menghapus kemiskinan
- 4) Mengatasi pengangguran
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- 6) Memajukan kebudayaan
- 7) Mengangkat citra bangsa
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- 10)Memperat persahabatan antar bangsa

2. PARIWISATA

1. PENGERTIAN PARIWISATA

Secara Etymologis kata “pariwisata” berasal dari bahasa Sanskerta, sesungguhnya bukanlah berarti *tourisme* (bahasa Belanda) atau *tourism* (bahasa Inggris). Kata bersinonim dengan kata *tour*. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Sedangkan Wisata berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini bersinonim dengan kata *travel*. Atas dasar tersebut pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan berkali-kali atau berputar putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris berarti *tour* (Yoeti ,1983:103).

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, menyatakan bahwa:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2. JENIS-JENIS PARIWISATA

Berbicara tentang kepariwisataan tidak lepas dari jenis-jenis pariwisata dan macam-macam objek wisata. Adapun jenis-jenis pariwisata menurut Nyoman S. Pendit (2003) dalam buku Ilmu Pengetahuan Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana adalah :

- a. Wisata Budaya

Seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang

dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, budaya dan seni mereka. Sering perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan kegiatan budaya.

b. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan-kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi di sumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata Olah Raga

Ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara, seperti Asia Games, Olimpiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain lain.

d. Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi

pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Tidak jarang pameran atau pekan raya ini dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi dan pertunjukan kesenian.

e. Wisata Industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kesuatu komplek satu daerah perindustrian dimana pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

f. Wisata Politik

Wisata politik adalah perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik, misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta, Penobatan Ratu Inggris di London, dan sebagainya.

g. Wisata Konvensi

Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya.

h. Wisata Sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan misalnya buruh, petani, atau mahasiswa.

i. Wisata Pertanian

Wisata pertanian adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk studi atau sekedar melihat-lihat sekelilingnya sambil menikmati segarnya tanaman beanekaragam dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur mayur dan palawija disekitar perkebunan yang di kunjungi.

j. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai, atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, berkeliling melihat taman laut dengan pemandangan yang indah dari permukaan air, serta berbagai rekreasi perairan.

k. Wisata Cagar Alam

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau

biro perjalanan yang mengkhususkan wisata dengan jalan mengatur wisata ketempat cagar alam atau hutan lindung.

I. Wisata Buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan dinegeri yang memiliki daerah atau tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah yang digalakan oleh agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan.

m. Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat-istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat yang dilakukan baik perorangan maupun rombongan yang berkunjung ketempat suci, kemakam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata Pilgrim ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah. Di tanah air kita banyak tempat suci atau keramat yang dikunjungi oleh umat-umat beragama tertentu, misalnya seperti Candi

Borobudur, Prambanan, Pura Besakih di Bali, Sendangsono di Jawa Tengah, makam Wali Songo, dan sebagainya.

n. Wisata Bulan Madu

Wisata bulan madu adalah perjalanan yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru yang diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan dengan fasilitas yang istimewa atau khusus yang sedang berbulan madu dengan fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka, seperti kamar pengantin di hotel yang khusus disediakan dengan peralatan yang serba istimewa.

o. Wisata Petualangan

Wisata petualangan adalah jenis wisata yang melakukan kegiatan wisata seperti masuk hutan belantara yang tadinya belum pernah dijelajah, mendaki tebing yang terjal, terjun kedalam sungai yang curam, arung jeram menyusuri goa dan susur pantai.

3. WISATA BAHARI

Wisata bahari adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal lanscape*), Fandeli (2000). Menurut Bengen (2001), wisata bahari oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pariwisata,

dimasukkan pada wisata minat khusus, sedangkan wisata minat khusus didefinisikan sebagai perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena tujuan khusus mengenai sesuatu jenis objek atau kegiatan yang dapat dilakukan di lokasi atau daerah destinasi tersebut.

2.6 PENGEMBANGAN PARIWISATA

Menurut Pitana (2005:56), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Menurut Suwanto (2002), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi:

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

- 1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.

- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- 3) Adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka.
- 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan.
- 5) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain).
- 6) Obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

2.7 KERANGKA KONSEP

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan. (Pasal 18 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata).

Dinas Pariwisata sebagai salah satu dinas di Kabupaten Bulukumba adalah organisasi pariwisata daerah yang bertugas dalam menjalankan roda pembangunan di sektor pariwisata. Dinas Pariwisata melakukan pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata sebagai fungsi dari tupoksi Dinas Pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana peran dinas pariwisata kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Bulukumba. Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu Kerangka Konsep yang dijabarkan melalui skema berikut

Bagan Kerangka Konsep :

Gambar 1. Kerangka Konsep

